

KLIPING BERITA

Sumber : Setda Dompus

09 Maret 2022



SetdaDompusKab.go.id – Pemerintah Kabupaten Dompus bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Bara, Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Kota Mataram resmi menyerahkan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2021 (UNAUDITED) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Senin (7/3/2021).



Bupati Dompu menandatangani Berita Acara Penyerahan Dokumen LKPD Kabupaten Dompu TA 2021. (Dok : Prokopim).

Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu tersebut diserahkan secara langsung Bupati/Wali Kota dan terima Kepala BPK-NTB di Ruang Auditorium BPK, Senin (7/3/2022).

Usai menyerahkan dokumen tersebut, mewakili pimpinan daerah lainnya, Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan pidato LKPD Dompu yang telah disusun berdasarkan basis akuntansi Akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akrual. "Begitu juga dengan Kabupaten/Kotalainya, saya yakin kita semua berlandaskan regulasi yang sama dalam menyusun laporan keuangan," ungkap Bupati.

Namun tidak bisa dipungkiri, kata Bupati ada kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, seperti menggunakan Aplikasi lain selain Aplikasi Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang handal, kondisi wilayah yang berjauhan dan lainnya.



Mewakili pimpinan daerah lainnya, Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan pidato Penyampaian Dokumen LKPD. (Dok : Prokopim).

“Untuk itu kami harap arahan dan bimbingan dari BPK agar kedepan kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih akuntabel sehingga memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan tolak ukur atau indicator penilaian akuntabilitas keuangan pemerintah daerah,” tutupnya sembari berharap 5 daerah yang hadir memperoleh WTP yang lebih baik tanpa ada catatan-catatan dari BPK.

Sementara itu, Ade Iwan Ruswana Kepala BPK RI Perwakilan NTB mengatakan pemeriksaan LKPD diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah.

“Pada akhir bulan Maret tim akan melakukan audit secara langsung di tiap-tiap daerah dan Insya Allah akhir bulan April, hasilnya sudah bisa kita serahkan. Entah itu Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian bahkan Disclaimer,” ujarnya.



Dihadapan Kepala BPK, para pimpinan daerah dan tamu undangan lainnya, Bupati Dompu Kader Jaelani menyampaikan pidato penyampaian Dokumen LKPD. (Dok : Prokopim)

Namun, apa bila LKPD dilakukan dengan sistem pengendalian yang bagus akan diberikan batas toleransi berdasarkan penglihatan dan pengamatan (opservasi). "Bila melebihi batas toleransi dan tersistem matik adanya skenario yang masif (merugikan keuangan Negara, red), maka akan kita kualifikasi bahkan diberikan opini tidak wajar," katanya.

Dalam memudahkan pemeriksaan LKPD, Ade Iwan Ruswana menyarankan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat untuk membentuk Tim *Counterpain* sebanyak 3 orang yang akan menemani dan membantu kerja Tim BPK dalam melakukan Audit pemeriksaan, pengkajian dan perumusan. "Ini sebagai penyambung untuk mengkoreksi kembali kesalah-kesalahan yang ada sebelum diberikan kesimpulan atas data yang disampaikan," ujarnya.

PENERIMAAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 (UNAUDITED)

DI WILAYAH NTB



5 Pimpinan daerah dan Kepala BPK Perwakilan NTB foto bersama usai acara. (Dok : Prokopim).

Ia juga menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk betul-betul menyerahkan data yang benar dan tidak disembunyikan yang dapat merugikan daerah terkait opini yang akan disampaikan. "Rugi kalau data disembunyikan dan tidak diberikan, nanti opini yang diberikan tidak wajar atau disclaimer. Maka, berikan data dengan baik dan cepat agar keuangan pemerintah daerah mendapatkan Opini WTP," katanya.

Sebelum mengakhiri arahnya, Ade Iwan Ruswana menyampaikan kepada pimpinan daerah untuk tidak ragu melaporkan apabila ada ketidakpuasan dalam pemeriksaan yang dilakukan auditor. "Silakan hubungi kami atau WA (WhatsApp) langsung ke saya, kalau auditor minta uang, arogan atau apalah. Maka akan kami tindak lanjuti," tutupnya sera berharap 5 daerah yang menyampaikan LKPD mendapatkan Opini WTP dan temuan-temuannya semakin kecil.

Penyerahan LKPD Tahun anggaran 2021 (UNAUDITED) yang dihadiri 5 pimpinan daerah bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) tersebut berjalan dengan aman dan lancar. **(baprokopim)**